

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan banyak ditemui di berbagai negara berkembang hingga menjadi fokus utama dunia. Masyarakat yang berada digaris kemiskinan tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan dasar hidup yang layak. Maka, dalam hal ini kemiskinan memiliki dampak yang amat luas serta mempengaruhi pada berbagai aspek, seperti kualitas pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan hingga terjadinya ketidakberdayaan dan juga ketimpangan sosial (Fadhilah Haya et al., 2022, hlm.3). Menurut informasi dari website <https://sdgs.bappenas.go.id/> yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), bahwasanya sebagai upaya untuk terciptanya kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan memiliki 17 tujuan yang dapat mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari 17 tujuan program SDGs tersebut, pengentaskan kemiskinan merupakan tujuan yang pertama dan diutamakan, ini dikarenakan kemiskinan akan sangat mempengaruhi terhadap seluruh aspek kehidupan dan kemiskinan dapat menghambat pembangunan dalam hal keseluruhan. Dengan demikian, suatu pembangunan yang berkelanjutan akan terwujud apabila masyarakat sudah ada dalam kategori hidup yang layak Amartya Sen (dalam BPS Indonesia, 2023, hlm.7).

Pada prosesnya pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwasanya terjadi peningkatan pemahaman dalam mengendalikan ekonomi, sosial dan politiknya guna memperbaiki kedudukannya. Proses tersebut terus diupayakan sejak tahun 1990 oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui *Human Development Report* (HDR) dengan konsep pembangunan terkait indeks pembangunan manusia (IPM). Konsep indeks pembangunan manusia (IPM) ini merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat yang pada fokusnya meningkatkan berbagai keahlian dan kemampuan dasar masyarakat agar

berpartisipasi pada proses pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan. Tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 73,8¹¹ kemudian pada tahun 2023 mencapai 74,4¹¹, dari data tersebut menunjukkan bahwasanya terdapat peningkatan, tetapi jika dilihat dan dibandingkan dengan beberapa negara, Indonesia masih tertinggal jauh dan pada tahun 2022 menduduki peringkat ke 112 (BPS Indonesia, 2024, hlm. 169). Pada Indeks Pembangunan Manusia terdapat tiga aspek yaitu, pertama harapan hidup (kesehatan), kemudian pengetahuan berdasarkan kemampuan membaca hingga menulis (pendidikan), dan juga akses untuk kehidupan yang layak (perekonomian) (BPS Indonesia 2023, hlm.13). Dengan demikian, jika kita cermati dari data tersebut masih diperlukannya upaya secara terus menerus dan juga berkelanjutan yang dapat mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Ini dikarenakan pada hakikatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dengan capaian angka yang tinggi, maka tingkat kemiskinan akan rendah, begitupun sebaliknya jika indeks pembangunan manusia (IPM) rendah, maka tingkat kemiskinan akan tinggi (Hakim & Wijaya 2023, hlm.3). Dalam proses peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) tidak hanya akan berdampak kepada kualitas hidup secara umum, tetapi akan berperan juga dalam strategi pengentasan kemiskinan yang terjadi, hal tersebut dapat menjadi suatu langkah yang mendukung untuk memutus siklus kemiskinan dan juga dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan merupakan sebagai langkah awal yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) hingga dapat mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Pada proses pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan untuk memberikan perubahan terhadap kondisi masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya, sehingga masyarakat tersebut mampu mengatasi berbagai tantangan yang terjadi secara mandiri hingga terciptanya kualitas dan mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan tersebut.

Keberhasilan pemberdayaan ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam menguasai dan mengelola informasi, pengetahuan, dan sumber daya yang ada. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif dari proses pemberdayaan,

namun juga menjadi subjek aktif. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses ini sangat penting untuk mencapai tingkat pemberdayaan yang sesuai tujuan (Syah et al., 2023, hlm.3). Adapun menurut Sulistiyani (dalam Wulandari et al., 2022, hlm.8) menyatakan bahwasanya suatu program pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil apabila ditandai dengan beberapa indikator sebagai berikut, (1) Jumlah penduduk miskin menurun, (2) Meningkatnya pendapatan masyarakat miskin melalui usaha yang sedang dilakukannya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungannya, (3) Kesejahteraan lingkungan dan keluarga meningkat ditandai dengan kepedulian masyarakatnya, (4) Meningkatnya kemandirian kelompok usaha dengan bertambahnya produktivitas dalam usaha kelompok maupun anggotanya seperti administrasi yang tertib dan juga meluasnya interaksi dengan kelompok lain maupun masyarakat, (5) Pemerataan pendapatan masyarakat miskin meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pokoknya.

Pemberdayaan merupakan suatu proses menuju perubahan dan berkembang secara positif dari aspek sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga, mampu menciptakan kualitas SDM dan tercapainya keberdayaan dalam masyarakat itu sendiri. Selain daripada itu dalam suatu upaya pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi sudah teruji dapat meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mendukung terciptanya peningkatan kapasitas dan usaha ekonomi produktif (Boedijono et al. 2019, hlm.12).

Apabila dilihat secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 ayat 2, menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan IPM dan meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (LIJAMSOS) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, dibawah naungan Kementrian Sosial telah berupaya dan mengimplementasikan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan salah satunya adalah program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 menyatakan bahwa “Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan suatu

program kelompok dengan sasarannya untuk keluarga miskin yang sudah tervalidasi dalam data terpatu kesejahteraan sosial (DTKS) yang berproses sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh tiap kelompoknya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan” (Menteri Sosial RI, 2019). Dengan demikian, program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat miskin yang pada konsepnya memberikan bantuan sosial berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan kata lain pada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini merupakan sebagai bantuan maupun investasi jangka panjang yang difasilitasi untuk membuka usaha dan diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah bertujuan agar dapat meningkatnya pendapatan dan jiwa berusaha anggota sehingga dapat memenuhi berbagi kebutuhannya secara mandiri dan dapat berkontribusi untuk memutus rantai kemiskinan.

Kota Tasikmalaya dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-3 di Jawa Barat dengan angka 11,53% pertahun 2023 dalam sumber BPS Provinsi Jawa Barat, (2024) penduduk Kota Tasikmalaya termasuk penduduk miskin. Sedangkan menurut informasi dari website <https://opendata.tasikmalaya.go.id> yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Tasikmalaya jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur produktif (15-64 tahun) terdapat 518.931 orang atau setara dengan 68,48%. Jika dilihat dari data tingkat pengangguran terbuka Kota Tasikmalaya tahun 2023 memang mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan presentase 6,62% menjadi 6,55% dengan jumlah keseluruhan penduduk Kota Tasikmalaya pertahun 2023 berjumlah 757.815 orang, memang masih tergolong tinggi yaitu 49.637 orang pengangguran di Kota Tasikmalaya. Jika diamati dari data tersebut maka dalam hal ini kebutuhan untuk mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan yang efektif sebagai upaya mendukung indeks pembangunan manusia (IPM) dan juga meningkatkan keberdayaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mempunyai kaitan yang erat dengan pendidikan masyarakat, khususnya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Peran pekerja sosial dan pendamping dalam program Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya memonitoring tetapi juga sebagai fasilitator yang berupaya melakukan pemantauan maupun bimbingan yang berfungsi sebagai mekanisme evaluasi. Dengan demikian, program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak hanya menjadi wadah peningkatan perekonomian, namun juga merupakan wadah yang efektif, mendorong serta terciptanya partisipasi aktif yang berkelanjutan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Salah satu kelurahan yang sudah banyak didanai pada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi. Kelurahan tersebut terdapat 5 (lima) kelompok usaha bersama (KUBE), dan salah satu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ditemukan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Peneliti mendapat informasi bahwasanya secara umum anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada kelurahan tersebut sering dihadapi kendala terkait dengan pengembangan usaha. Masalah yang teridentifikasi adalah keterbatasan modal. Sehingga dari keterbatasan tersebut berdampak kepada kelangsungan usaha mereka yang mengakibatkan proses produksi menjadi terbatas dan proses pemasaran tidak luas dan pendapatan cenderung tidak menentu. Secara gilirannya permasalahan tersebut dapat menyebabkan penurunan motivasi untuk melanjutkan produksi dan menciptakan siklus negatif.

Oleh karena itu, perlunya suatu penelitian untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Cipawitra. Sehingga informasi yang didapat dari hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Maka, berdasarkan hasil dari uraian tersebut, peneliti mengambil judul penelitian “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama dalam Meningkatkan Pendapatan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut.

1.2.1 Anggota pada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kelurahan Cipawitra memiliki keterbatasan modal.

1.2.2 Anggota pada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kelurahan Cipawitra memiliki kendala terkait pendapatan yang cenderung tidak menentu

1.2.3 Salah satu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Cipawitra ditemukan tidak berfungsi sebagaimana mestinya

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang tertera di latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, “Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kelurahan Cipawitra dalam meningkatkan pendapatan anggotanya?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kelurahan Cipawitra dalam meningkatkan pendapatan anggotnya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaan baik secara praktis maupun secara teoritis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil pada penelitian ini semoga dapat menambah wawasan, informasi, dan juga kajian mengenai pendidikan masyarakat terutama pada pemberdayaan masyarakat miskin terkait dengan proses pada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan anggotanya. Kemudian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya

1.5.2 Kegunaan Praktis

1.5.2.1 Bagi Penulis

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai suatu upaya untuk penambahan wawasan hingga pengalaman, sebagaimana penulis sudah berproses secara maksimal untuk melaksanakan penelitian ini, banyak ilmu, pengetahuan dan wawasan yang telah penulis dapat selama berproses. Dan juga sebagai pemasukan pemikiran terkait dengan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan pendapatan terkhusus untuk di Kelurahan Cipawitra.

1.5.2.2 Bagi Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Peneliti memiliki harapan agar penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi para anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terkhusus untuk di Kelurahan Cipawitra dan umumnya untuk seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di seluruh Indonesia sebagai upaya untuk mendapat wawasan terutama terkait dengan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses dan juga mengukur bayangan ataupun gambaran hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta dapat mengimplementasikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menjadi anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terutama dalam proses Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

1.5.2.3. Bagi Dinas Sosial

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan, sumbangan pemikiran dan juga informasi terkait proses dan gambaran hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

1.6 Definisi Operasional

Pada penelitian ini, peneliti memberikan batasan terkait dengan berbagai istilah-istilah yang berkaitan dengan variabel maupun judul agar dapat memastikan bahwa penelitian benar-benar meneliti apa yang seharusnya diteliti.

1.6.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan berbagai kapasitas serta kemandirian individu maupun kelompok dalam suatu komunitas, sehingga mereka mampu mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan mengatasi permasalahan secara mandiri demi peningkatan kualitas hidup mereka.

1.6.2 Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat miskin yang pada konsepnya memberikan suatu bantuan sosial dari pemerintah berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan kata lain pada program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini merupakan sebagai bantuan maupun investasi jangka panjang (modal) yang difasilitasi untuk membuka usaha secara bersama-sama.

1.6.3 Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan sekumpulan masyarakat yang tergolong kedalam kategori kurang mampu (miskin) sudah tervalidasi oleh data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta bergabung pada program Kelompok Usaha Bersama, sebagai anggota penerima Usaha Ekonomi Produktif (UEP), anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) secara berkelompok menjalankan usaha produktifnya sesuai dengan peluang dan keahliannya. Umumnya, anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terdiri dari 5-10 orang ataupun kepala keluarga yang memiliki latar belakang ekonomi serupa dan tinggal di wilayah yang berdekatan dalam satu lingkup rukun tetangga (RT) maupun rukun warga (RW).

1.6.4 Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu perolehan yang didapat oleh individu, maupun kelompok dapat berupa sejumlah uang maupun nilai materi. Suatu pendapatan diperoleh dari suatu aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan.